



INDONESIA INDICATOR

LAPORAN MEDIA CETAK

**Pj. Gubernur Jawa Tengah
Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M
(17 Januari 2025)**

Summary

Media	News	Positive	Neutral	Negative
1	2	0	0	2

Daily Statistic

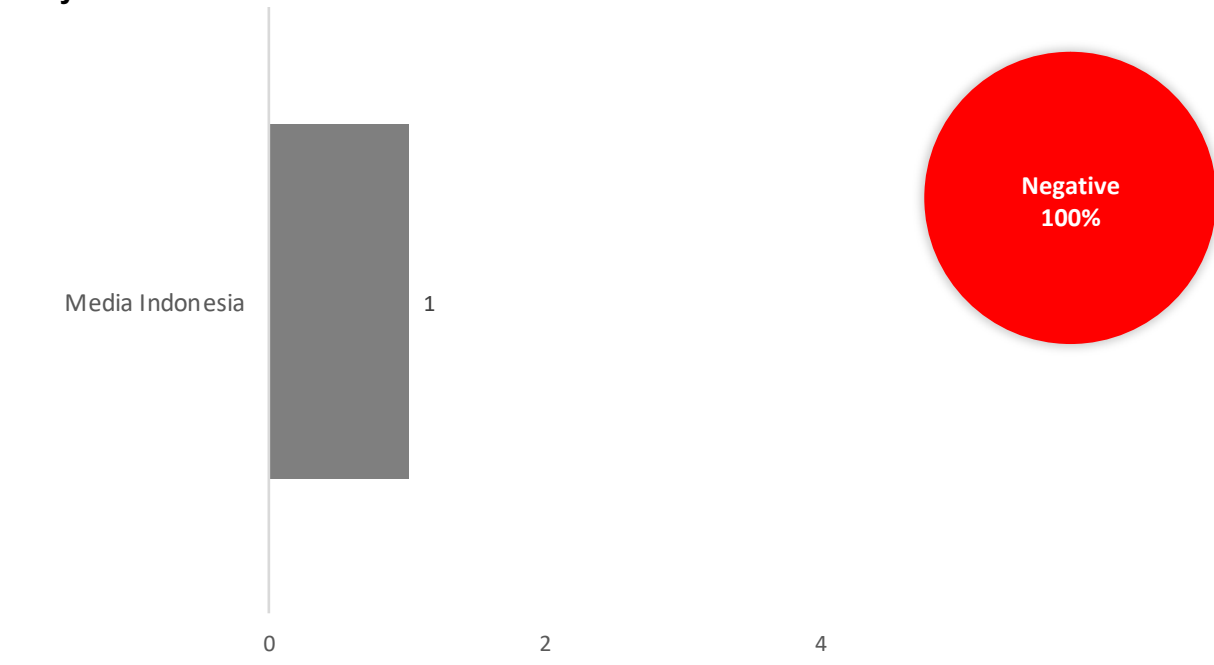


Table Of Contents : 17 Januari 2025

No	Date	Media	News Title	Page	Sentiment	Influencers
1	17 Januari 2025	Media Indonesia	Hasil Judol Digunakan Bangun Hotel	4	Negative	Helfi Assegaf
2	17 Januari 2025	Media Indonesia	Aturan Teknis UU Desa Mendesak Diterbitkan	9	Negative	Muhammad Asri Anas, Asri Anas

Title	Hasil Judol Digunakan Bangun Hotel		
Media	Media Indonesia	Reporter	Ant/I-
Date	2025-01-17	Tone	Negative
Page	4	PR Value	
Summary	<p>Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari tindak pidana asal perjudian online untuk pembangunan Hotel Aruss di Semarang, Jawa Tengah.</p> <ul style="list-style-type: none">- "Kita sudah menetapkan tersangka. Yang pertama yaitu korporasi PT AJP yang berkantor di Hotel Aruss, Semarang. Kemudian tersangka yang kedua, yakni FH," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, kemarin.- Dia menjelaskan, modus operandi yang digunakan ialah PT AJP menampung uang dari rekening tersangka FH yang digunakan untuk pembangunan Hotel Aruss, di Semarang dalam kurun waktu 2020-2022, dengan jumlah transaksi mencapai Rp 40,560 miliar. Uang tersebut diduga berasal dari hasil bisnis judi online (judol), antara lain Dafabet, Agen138, dan Judi Bola.- Total barang bukti yang sudah disita ialah sebesar Rp103,2 miliar, yang berasal dari 15 rekening yang sebelumnya telah di blokir atas dugaan melakukan transaksi judol periode 2020-2022.		



BANGUN HOTEL ARUSS DARI HASIL JUDI. Anggota Progam Polri menaja barang bukti uang saat konferensi pers terkait dengan penetapan tersangka TPPU hasil judol online di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, kemarin. Selain menyita uang Rp103,2 miliar, Bareskrim Polri juga menetapkan korporasi PT Arto Jaya Putra dan komikannya yang berstatus FH sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil judol online dengan cara membangun Hotel Aruss di Semarang, Jawa Tengah.

Hasil Judol Digunakan Bangun Hotel

Total barang bukti yang sudah disita sebesar Rp103,2 miliar, berasal dari 15 rekening hasil judi online yang dikelola FH.

Vania Lu Tioce
vatiol@indonesiaindicator.com

DIREKTORAT Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari tindak pidana asal perjudian online untuk pembangunan Hotel Aruss di Semarang, Jawa Tengah.

"Kita sudah menetapkan tersangka. Yang pertama yaitu korporasi PT AJP yang berkantor di Hotel Aruss, Semarang. Kemudian tersangka yang kedua, yakni FH," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, modus operandi yang digunakan ialah PT AJP menampung uang dari rekening tersangka FH yang digunakan untuk pembangunan Hotel Aruss

di Semarang dalam kurun waktu 2020-2022, dengan jumlah transaksi mencapai Rp40,560 miliar. Uang tersebut diduga berasal dari hasil bisnis judi online (judol), antara lain Dafabet, Agen138, dan Judi Bola.

Kemudian, PT AJP mengelola hasil dari judol dan hasilnya dimanfaatkan kepada perusahaan tersebut. "PT AJP berdiri pada 2007. Usaha utamanya yaitu properti, khususnya mengelola yang diterima FH. Kemudian FH di PT AJP bertindak sebagai komisiaris," ucapnya.

Dari hasil pengelolaan Ditipideksus, lanjut dia, ditemukan alasan dana dari FH yang masuk ke rekening milik PT AJP. Selain dari FH, ditemukan juga uang yang masuk dari lima rekening penampung, yaitu 1 rekening atas nama OK, 1 rekening atas nama KR, 1 rekening atas nama MI, dan 1 rekening atas nama KS. Uang hasil judol yang sudah disita telah sebesar Rp103,2 miliar, yang berasal dari 15 rekening yang sebelumnya ter-

sebutkan perusahaan tersebut dalam kurun waktu 2020-2022. Selain ditemukan barang bukti dan saksi yang cukup serta ada perbuatan melawan hukum, maka dia, selanjutnya Dirtipideksus menetapkan kasus TPPU itu ke tahap penyidikan.

Helfi mengatakan FH belum ditahan karena menderita stroke. "Penderita bukan (SD) menimbulkan suatu rawat. FH sedang di rawat di rumah sakit karena stroke sehingga tidak bisa dihadirkan di sini," katanya.

Selanjutnya, pengantar kebijakan publik yang juga CEO Nersmi Business Achmad Nur Hidayat menilai judol hanya mengontang-kantong para bandar, tetapi semakin mengancam stabilitas nasional. Aktivitas ilegal itu tak hanya berdampak pada aspek sosial, tapi juga mengganggu aktivitas nyata bagi rumah tangga, produktivitas tenaga kerja, serta sektor ekonomi lain.

"Kemungkinan besar dari aktivitas judol sangat berdampak oleh regulasi yang ada, yaitu para bandar yang saat ini belum ada yang ditahan aparat penegak hukum. Sementara itu, dampak negatifnya harus ditangani oleh masyarakat lain," tegasnya.

Achmad menyampaikan bahwa 60% dari 4,4 juta pelaku judol justru berasal dari masyarakat kelas menengah ke bawah atau kelompok paling rentan secara ekonomi. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok, pendidikan, atau investasi keluarga, justru terbelang tanpa manfaat.

Hal itu menyebabkan penurunan daya beli, menurun di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, pengalihan bakam saja tidak cukup. Pemerintah harus meningkatkan literasi keuangan masyarakat. (Ant3/2)

rekening perusahaan tersebut dalam kurun waktu 2020-2022. Selain ditemukan barang bukti dan saksi yang cukup serta ada perbuatan melawan hukum, maka dia, selanjutnya Dirtipideksus menetapkan kasus TPPU itu ke tahap penyidikan.

Helfi mengatakan FH belum ditahan karena menderita stroke. "Penderita bukan (SD) menimbulkan suatu rawat. FH sedang di rawat di rumah sakit karena stroke sehingga tidak bisa dihadirkan di sini," katanya.

Selanjutnya, pengantar kebijakan publik yang juga CEO Nersmi Business Achmad Nur Hidayat menilai judol hanya mengontang-kantong para bandar, tetapi semakin mengancam stabilitas nasional. Aktivitas ilegal itu tak hanya berdampak pada aspek sosial, tapi juga mengganggu aktivitas nyata bagi rumah tangga, produktivitas tenaga kerja, serta sektor ekonomi lain.

"Kemungkinan besar dari aktivitas judol sangat berdampak oleh regulasi yang ada, yaitu para bandar yang saat ini belum ada yang ditahan aparat penegak hukum. Sementara itu, dampak negatifnya harus ditangani oleh masyarakat lain," tegasnya.

Achmad menyampaikan bahwa 60% dari 4,4 juta pelaku judol justru berasal dari masyarakat kelas menengah ke bawah atau kelompok paling rentan secara ekonomi. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok, pendidikan, atau investasi keluarga, justru terbelang tanpa manfaat.

Hal itu menyebabkan penurunan daya beli, menurun di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, pengalihan bakam saja tidak cukup. Pemerintah harus meningkatkan literasi keuangan masyarakat. (Ant3/2)

Title	Aturan Teknis UU Desa Mendesak Diterbitkan		
Media	Media Indonesia	Reporter	JS/J-3
Date	2025-01-17	Tone	Negative
Page	9	PR Value	
Summary	<p>Peringatan Hari Desa Nasional 2025 digelar pada Rabu (15/1) di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Klaten, dihadiri ribuan perangkat desa dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Desa Bersatu. Hari Desa Nasional ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa, dan mulai berlaku pada 25 April 2024.</p> <ul style="list-style-type: none">- Ketua Umum Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, dalam sambutannya mengungkapkan Asosiasi Desa Bersatu adalah wadah bernaung atau berhimpunnya delapan organisasi desa nasional. Dalam kesempatan tersebut, Asri Anas mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah sebagai aturan teknis UU No 3 Tahun 2024 Tentang Desa.- "Menyedihkan, karena hingga hari ini sebanyak 58 kabupaten perangkat desanya tidak mendapatkan siltap (penghasilan tetap) gaji 3-8 bulan," ujarnya. sPeringatan Hari Desa Nasional 2025 dihadiri Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, serta pejabat tingkat provinsi dan kabupaten.		

● KLATEN, JAWA TENGAH

Aturan Teknis UU Desa Mendesak Diterbitkan

PERINGATAN Hari Desa Nasional 2025 digelar pada Rabu (15/1) di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Klaten, dihadiri ribuan perangkat desa dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Desa Bersatu.

Hari Desa Nasional ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa, dan mulai berlaku pada 25 April 2024. Ketua Umum Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, dalam sambutannya mengungkapkan Asosiasi Desa Bersatu adalah wadah bernaung atau berhimpunnya delapan organisasi desa nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Asri Anas mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah sebagai aturan teknis UU No 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

"Peraturan pemerintah itu belum ada sampai sekarang. Menyedihkan, karena hingga hari ini sebanyak 58 kabupaten perangkat desanya tidak mendapatkan siltap (penghasilan tetap), gaji 3-8 bulan," ujarnya.

Kemudian, Asri Anas menyampaikan bah-

wa Desa Bersatu mendukung swasembada pangan melalui program percepatan cetak sawah dan penguatan lahan potensi yang ada di desa.

"Kami komitmen, Pak. Alhamdulillah dengan Kementerian Pertanian kami terlibat dalam pendataan seluruh area pertanian di seluruh Indonesia," kata Asri Anas.

Selain itu, Desa Bersatu juga mendukung program makan siang bergizi gratis dengan mengoptimalkan potensi pangan desa, serta mendukung pembangunan 3 juta rumah desa tidak layak huni.

Terkait dana desa, Asri Anas meminta kepada pemerintah untuk memberikan kewenangan proporsional pemerintah desa dan masyarakat dalam menentukan sendiri penggunaan dana tersebut.

"Karena, 70% dana desa masih diatur pemerintah pusat. Sedangkan yang 30% digunakan untuk mendukung program atau kebijakan strategis nasional. Ini yang dikeluhkan seluruh desa," imbuhnya.

Terakhir, dengan adanya juknis tentang pelaksanaan peringatan Hari Desa Nasional pada 15 Januari, seluruh 75.265 desa di Indonesia bisa berpesta dalam rangka peringatan tersebut.

Tetapi, lanjut Anas, jika 70% kewenangan penggunaan dana desa diserahkan ke pemerintah desa berdasarkan musyawarah, desa-desa di Indonesia bisa maju, seperti Desa Ponggok.

Peringatan Hari Desa Nasional 2025 dihadiri Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana, serta pejabat tingkat provinsi dan kabupaten. (JS/J-3)